

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Jurnal

- Jahidin, H. J. (2019). FUNGSI DAN WEWENANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BERDASARKAN AZAS OTONOMI DAERAH SELUAS-LUASNYA. *Law Review*, 19(2), 203. <https://doi.org/10.19166/lr.v0i2.1877>
- Kartoprawiro, S., & Susanto, Y. (2018). Analisis Terhadap Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya*, 16(1), 1–14. <https://doi.org/10.29259/jmbs.v16i1.6242>
- Kusriyah, S. (2019). *Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*. UNISSULA PRESS Semarang.
- Nurdiwaty, D., Zaman, B., & Kristinawati, E. (2017). Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap belanja modal di kabupaten/kota Jawa Timur. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 17(1), 43–59. <https://doi.org/10.20885/jabis.vol17.iss1.art3>
- Pangkey, I. (2015). ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI ANGGARAN BELANJA PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI SULAWESI UTARA. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(4).
- Purba, R. B., Umar, H., & Pramana, S. (2019). Minimalisasi Tingkat Salah Saji Pencatatan Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Peran dan Fungsi SPIP di Dinas Pendapatan Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 10(1), 172–192.
- Rosyada, A. H. (2017). *Analisis Efektivitas Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pad Provinsi Lampung Tahun 2011-2015 Dalam Perspektif Ekonomi Islam*.
- Sudarmana, I. P. A., & Sudiarta, G. M. (2020). PENGARUH RETRIBUSI DAERAH DAN PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI DINAS PENDAPATAN DAERAH. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 9(4), 1338. <https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2020.v09.i04.p06>

### B. Buku

- Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah* (4th ed.). Salemba Empat.

Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (4th ed.). Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

### **C. Peraturan**

*Buletin Teknis Nomor 23 tentang Akuntansi Pendapatan Non Perpajakan.* (2016).

*Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Retribusi Daerah.* (2019).

*Peraturan Gubernur Lampung Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.* (2016).

*Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.* (2010).

*Undang-Undang Dasar 1945.* (1945).

*Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah.* (2006).

*Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.* (2014).

*Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.* (2009).

### **D. Sumber Lainnya**

ESDM Provinsi Lampung. (2019). *Peta Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik Provinsi Lampung.* <https://esdm.lampungprov.go.id/pages/peta-tematik-ketenagalistrikan>

Provinsi Lampung. (2019). *Visi Misi Provinsi Lampung.* [Www.Lampungprov.Go.Id. https://www.lampungprov.go.id/pages/visi-misi-provinsi-lampung](https://www.lampungprov.go.id/pages/visi-misi-provinsi-lampung)

Provinsi Lampung. (2020). *Struktur Organisasi Provinsi Lampung.* [Www.Lampungprov.Go.Id. https://lampungprov.go.id/pages/struktur-organisasi-provinsi-lampung](https://lampungprov.go.id/pages/struktur-organisasi-provinsi-lampung)